



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI TENGGARA**

BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN, NYATA DALAM PENEGAKAN HUKUM

BULETIN EDISI XXII 08 — 12 JUNI 2026



APEL GABUNGAN: PENGUATAN KOMITMEN MENUJU KEMENIMIPAS YANG BERSIH DAN BERINTEGRITAS



Kendari – Dalam upaya memperkuat komitmen seluruh jajaran menuju Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) yang bersih, profesional, dan berintegritas, Kanwil Ditjen Imigrasi laksanakan Apel Gabungan yang bertempat di Halaman Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari pada Senin, 8 Juni 2026.

Kegiatan apel dipimpin langsung oleh Ganda Samosir selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara. Apel gabungan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai sebagai bentuk penguatan disiplin, soliditas, dan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam amanatnya, Ganda Samosir menegaskan pentingnya menjaga integritas sebagai landasan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Beliau mengajak seluruh pegawai untuk terus meningkatkan profesionalisme, serta menjunjung tinggi nilai-nilai PRIMA.

Melalui kegiatan apel ini, diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan semangat kebersamaan antar pegawai dalam mendukung tugas dan fungsi keimigrasian. Dengan semangat kerja yang berintegritas, diharapkan seluruh jajaran dapat terus menghadirkan pelayanan publik yang PRIMA, transparan, dan berorientasi pelayanan kepada masyarakat.

DEKATKAN PELAYANAN PASPOR HINGGA KE BOMBANA: KANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA BERIKAN PENDAMPINGAN MELEKAT DI MPP

BOMBANA. 8 Juni 2026 – Berkomitmen untuk terus menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara proaktif mengawal inovasi layanan jemput bola. Komitmen ini dibuktikan lewat langkah pendampingan langsung pada pelaksanaan kegiatan layanan Eazy Passport di Kabupaten Bombana. Layanan keimigrasian bergerak ini diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari sebagai unit pelaksana teknis di lapangan.



Untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi masyarakat, kegiatan Eazy Passport kali ini dipusatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bombana. Kehadiran jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara di lokasi tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh proses pelayanan, mulai dari tahap verifikasi berkas, wawancara, hingga pengambilan data biometrik berupa foto dan sidik jari pemohon, dapat berjalan sesuai dengan prosedur standar operasi (SOP) yang telah ditetapkan.

MENJAWAB TINGGINYA ANTUSIASME MASYARAKAT DI MPP BOMBANA

Kabupaten Bombana yang memiliki jarak tempuh cukup jauh dari pusat kota Kendari sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi warga setempat yang ingin mengurus dokumen perjalanan. Oleh karena itu, pemilihan MPP Kabupaten Bombana sebagai pusat kegiatan dinilai sangat strategis karena lokasinya yang representatif dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Sejak loket pelayanan dibuka, antusiasme warga tampak begitu besar untuk memanfaatkan kemudahan pengurusan paspor ini.

Melihat tingginya animo tersebut, tim dari Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara bersama petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari langsung sigap melakukan manajemen alur pelayanan di area MPP. Pendampingan melekat ini dilakukan secara komprehensif guna mengurai potensi antrean panjang, memberikan asistensi pengisian formulir bagi lansia, serta mengantisipasi terjadinya kendala teknis pada sistem kesisteman keimigrasian yang dibawa ke lokasi.



INOVASI LAYANAN KOLEKTIF YANG MEMBANTU KOMUNITAS

Layanan Eazy Passport sendiri merupakan salah satu program unggulan Direktorat Jenderal Imigrasi yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan paspor secara kolektif di lokasi yang mereka inginkan. Dalam pelaksanaan di MPP Kabupaten Bombana kali ini, berbagai kelompok masyarakat mulai dari pelaku usaha, calon jemaah umrah, hingga sektor keluarga merasa sangat terbantu karena efisiensi waktu dan biaya yang didapatkan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Kendari.

Di sela-sela kegiatan, jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara juga menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan para pemohon guna menyerap aspirasi dan testimoni terkait kepuasan pelayanan di MPP. Dialog interaktif ini penting sebagai bahan evaluasi berkala bagi jajaran keimigrasian di wilayah Sultra untuk terus menyempurnakan strategi jemput bola di daerah pendukung.

APRESIASI DAN SINERGI YANG BERKELANJUTAN

Rangkaian kegiatan pelayanan paspor massal di MPP Kabupaten Bombana ini akhirnya sukses dituntaskan dengan tertib, aman, dan lancar. Kolaborasi yang apik antara fungsi pembinaan dari pihak Kantor Wilayah dan fungsi eksekusi lapangan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari menjadi kunci utama di balik kesuksesan pelayanan prima ini.

Pihak Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Bombana atas fasilitas tempat di MPP serta seluruh masyarakat yang telah tertib selama proses pelayanan berlangsung. Ke depan, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara menegaskan akan terus mendukung dan mendorong Kantor Imigrasi di bawah jajarannya untuk memperluas jangkauan layanan Eazy Passport demi mewujudkan pelayanan keimigrasian yang semakin mudah, cepat, dan merata.

PELANTIKAN DAN PENGAMBULAN SUMPAH CPNS KANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA



Kendari – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertempat di Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara. Sebanyak 4 (empat) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.



Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara, Ganda Samosir. Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan penuh makna sebagai bentuk pengukuhan status kepegawaian sekaligus peneguhan komitmen para pegawai untuk menjalankan amanah sebagai aparatur negara yang profesional dan berintegritas.

Dalam sambutannya, Ganda Samosir menyampaikan bahwa pengangkatan CPNS menjadi PNS merupakan awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam mengemban tugas dan fungsi keimigrasian. Beliau menekankan pentingnya menjaga integritas, disiplin, loyalitas, serta terus meningkatkan kompetensi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga nama baik institusi.



Melalui pelantikan dan pengambilan sumpah ini, diharapkan para pegawai yang baru diangkat menjadi PNS dapat menunjukkan dedikasi, profesionalisme, dan semangat pengabdian yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan komitmen tersebut, mereka diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan layanan keimigrasian yang berkualitas, akuntabel, dan terpercaya.

BENTENG KADULATAN DI PULAU MUNA: KANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA SISIR TITIK RAWAN ORANG ASING



MUNA, 9 Juni 2026 – Menjaga keamanan dan menegakkan hukum di wilayah kepulauan dengan garis pantai yang panjang merupakan tantangan tersendiri bagi jajaran imigrasi. Karakteristik wilayah Sulawesi Tenggara yang dinamis menuntut kesiapsiagaan penuh agar setiap aktivitas Warga Negara Asing (WNA) yang masuk tetap berada di bawah koridor hukum yang berlaku. Menjawab tantangan tersebut, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara kembali menunjukkan komitmennya dengan menggelar operasi pengawasan intensif di Kabupaten Muna.

Langkah taktis ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendeteksi secara dini setiap potensi pelanggaran keimigrasian. Selama empat hari penuh, sejak tanggal 07 hingga 10 Juni 2026, tim khusus dari Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara bergerak menyusuri berbagai sudut strategis di Kabupaten Muna. Operasi ini tidak hanya berfokus pada pemeriksaan dokumen, melainkan juga membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya pengawasan wilayah.

MENYATUKAN FREKUENSI BERSAMA KORPS BHAYANGKARA

Misi penting ini digerakkan dengan fokus penuh sejak hari pertama mendarat di Bumi Muna. Titik labuhan pertama yang dituju oleh tim keimigrasian adalah Markas Kepolisian Resor (Polres) Muna. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk memperkuat koordinasi keamanan di tingkat wilayah.

Kedatangan jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara ke markas korps baju cokelat tersebut bukan sekadar kunjungan seremonial belaka. Di ruang pertemuan, pihak imigrasi dan kepolisian langsung duduk bersama, membuka lembaran data, dan saling bertukar informasi intelijen terkait peta pergerakan orang asing di wilayah hukum Muna. Sinergi ini dirasa sangat vital mengingat Polres memiliki jaringan informasi yang luas hingga ke tingkat desa, menjadikannya mitra strategis utama bagi Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara dalam mengendus aktivitas mencurigakan sejak dini.



PENYISIRAN DI SEKTOR AKOMODASI

Usai mengunci kesepakatan taktis bersama kepolisian, tim bergerak menuju sektor-sektor yang menjadi pintu masuk utama peristirahatan para pelancong dan pekerja asing. Sektor perhotelan menjadi target krusial karena sering kali menjadi titik buta jika pengelolaannya tidak tertib administrasi. Langkah awal dimulai dengan menyambangi Hotel Aliah.



Di lokasi ini, suasana pengawasan yang humanis namun tegas langsung terasa saat petugas mulai memeriksa daftar *manifest* tamu hotel. Petugas dengan teliti mencocokkan data administratif yang dilaporkan pihak manajemen dengan kondisi riil di lapangan. Pemeriksaan dokumen ini penting dilakukan guna memastikan tidak ada celah bagi penyalahgunaan izin tinggal atau adanya WNA yang beraktivitas tanpa dokumen sah di wilayah tersebut.

Penyisiran kemudian dilanjutkan dengan menyasar Hotel Astika. Sama seperti di lokasi sebelumnya, audit dokumen akomodasi dilakukan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Kehadiran jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara di hotel-hotel ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan negara hadir dan aktif hingga ke tingkat daerah pendukung.

MENGUBAH POLA PIKIR LEWAT EDUKASI PERSUASIF

Menariknya, operasi kali ini tidak melulu soal penindakan hukum yang kaku. Di sela-sela pemeriksaan lembar dokumen di Hotel Aliah dan Hotel Astika, jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara memanfaatkan momentum untuk berdialog langsung dengan para pemilik dan pengelola hotel. Dialog ini dilakukan untuk memberikan edukasi mendalam mengenai kewajiban pelaporan orang asing yang menginap, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Petugas menjabarkan secara rinci bagaimana pengelola hotel dapat memanfaatkan sistem pelaporan digital yang kini telah disediakan. Dengan pendekatan persuasif ini, ketakutan pelaku usaha terhadap pemeriksaan perlahan mencair. Mereka mulai memahami bahwa ketertiban administrasi justru akan melindungi bisnis mereka dan menjaga situasi keamanan lingkungan sekitar tetap kondusif.

MENKAHIRI OPERASI DENGAN CATATAN POSITIF



Setelah empat hari berjibaku menyisir Kabupaten Muna, operasi pengawasan keimigrasian ini akhirnya diselesaikan dengan catatan yang sangat positif. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan tanpa ada kendala berarti di lapangan. Dukungan penuh dari aparat penegak hukum setempat serta sikap kooperatif dari para pelaku usaha perhotelan menjadi kunci utama kesuksesan misi kali ini.



Pihak Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantu jalannya pengawasan, serta mengingatkan bahwa keberhasilan ini adalah kemenangan bersama dalam menjaga tegaknya kedaulatan bangsa. Operasi serupa dipastikan akan terus dilakukan secara berkala di berbagai wilayah lainnya di Sulawesi Tenggara, memastikan bahwa gerbang hukum Indonesia tetap berdiri kokoh tanpa celah pelanggaran.

KANWIL DITJENIM SULTRA DAN PENGADILAN NEGERI WAKATOBI PERKUAT KOLABORASI PENEGAKAN HUKUM



Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara melaksanakan kunjungan koordinasi ke Pengadilan Negeri Wakatobi sebagai upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu strategis terkait hukum keimigrasian, pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta Tindak Pidana Penyelundupan Migran (TPPM). Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, dan kolaborasi antar aparat penegak hukum guna menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Melalui sinergi yang kuat, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran keimigrasian serta tindak pidana transnasional dapat dilaksanakan secara optimal demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.



PERKUAT TATA KELOLA KEIMIGRASIAN, KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI DIGELAR DI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BAUBAU



Baubau, 10 Juni 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara melaksanakan Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Pengoordinasian Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, terhitung mulai tanggal 9 hingga 12 Juni 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola keimigrasian serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau. Melalui kegiatan ini dilakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan layanan dokumen perjalanan, pengelolaan izin tinggal dan penanganan status keimigrasian guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain melakukan pemantauan, tim juga melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kinerja, potensi permasalahan, serta langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan juga menjadi sarana koordinasi dan penguatan sinergi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau dalam rangka mewujudkan pelayanan keimigrasian yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Hasil dari kegiatan pemantauan, analisis, dan evaluasi ini akan menjadi bahan pelaporan sekaligus dasar dalam penyusunan langkah-langkah strategis untuk mendukung peningkatan kualitas layanan keimigrasian serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara.



Melalui kegiatan ini, diharapkan penyelenggaraan layanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau dapat terus berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

KANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA GELAR KONFERENSI PERS PENINDAKAN 7 WNA ASAL TIONGKOK TERKAIT DUGAAN TPPM



Kendari, Jumat, 12 Juni 2026 — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara menggelar konferensi pers terkait penindakan keimigrasian terhadap 7 (tujuh) warga negara asing asal Tiongkok yang terindikasi melakukan pelanggaran administratif keimigrasian berupa overstay. Ketujuh WNA tersebut berhasil diamankan oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari di dua hotel yang berbeda di wilayah Kota Kendari.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, selain melakukan pelanggaran keimigrasian, ketujuh WNA tersebut juga diduga merupakan calon korban Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) yang akan diberangkatkan secara ilegal menuju Australia.



Sebagai bentuk penegakan hukum keimigrasian, ketujuh WNA tersebut dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara bersama seluruh jajaran akan terus memperkuat pengawasan orang asing guna menjaga keamanan dan ketertiban serta mencegah terjadinya tindak pidana yang melibatkan warga negara asing di wilayah Sulawesi Tenggara.

